

**DETERMINAN KEBERADAAN *RISK*
MANAGEMENT COMMITTEE PADA
PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MONA AJENG PUSPANINGRUM

NIM. C2C009147

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Mona Ajeng Puspaningrum
Nim : C2C009147
Fakultas/Jurusan : Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **DETERMINAN KEBERADAAN *RISK*
MANAGEMENT COMMITTEE PADA
PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : Dr. H. Sugeng Pamudji, M.si., Akt.

Semarang, 15 Februari 2013

Dosen Pembimbing

Dr. H. Sugeng Pamudji, M.si., Akt.

NIP. 19490124 198001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Mona Ajeng Puspaningrum
Nim : C2C009147
Fakultas/Jurusan : Ekonomika Dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **DETERMINAN KEBERADAAN *RISK*
MANAGEMENT COMMITTEE PADA
PERUSAHAAN *GO PUBLIC* DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 1 Maret 2013

Tim Penguji:

1. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.si., Akt. (.....)
2. Dr. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt. (.....)
3. Dr. P. Th. Basuki Hadiprajitno, MBA., MSAcc., Akt.(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya Mona Ajeng Puspaningrum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Determinan Keberadaan *Risk Management Committee* Pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Februari 2013

Yang membuat pernyataan,

(Mona Ajeng Puspaningrum)

NIM. C2C009147

ABSTRACT

This study aims to examine the information about The determinants of existence Risk Management Committee in Indonesia. This study was conducted by using independent variables are number Board of Commissioners, Proportion Independent Commissioner, Reputation of External Auditor, Corporate Complexity, Leverage and Financial Reporting Risk and its was used control variable is size of company. Existence of Risk Management Committee has two forms, they are Risk Management Committee joined with the Audit Committee and Risk Management Committee, which is separated from the Audit Committee or referred Separate Risk Management Committee (SRMC).

This research was conducted using Logistic Regression as a test of the hypothesis. Data collection in this study using purposive sampling to non-banking financial companies listed at the Indonesia Stock Exchange in 2011. as many as 219 companies are used as samples in this study.

Result of this study showed that the variables that affect existence of Risk Management Committee joined with the Audit Committee is affiliated with the Audit Committee is Reputation of External Auditor. Meanwhile, the variables that affect the existence of a separate Risk Management Committee separated from the Audit Committee is Leverage.

Key words: Corporate Governance, Risk Management Committee

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai determinan keberadaan *Risk Management Committee* di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan variabel independen yaitu, Jumlah Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Reputasi Auditor Eksternal, Kompleksitas Perusahaan, *Leverage* dan Risiko Pelaporan Keuangan serta penggunaan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Keberadaan *Risk Management Committee* memiliki dua bentuk, yaitu *Risk Management Committee* yang tergabung dengan Komite Audit dan *Risk Management Committee* yang terpisah dengan Komite Audit atau disebut *Separate Risk Management Committee* (SRMC).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Logistic Regression* sebagai alat uji hipotesis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* terhadap perusahaan non finansial perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. sebanyak 219 perusahaan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee* yang tergabung dengan Komite Audit adalah Reputasi Auditor Eksternal. Sedangkan variabel yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee* yang terpisah dengan Komite Audit adalah *Leverage*.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Risk Management Committee*

Motto dan Persembahan

“There is no other strength that is beyond the power of
dream and hope” – *Fazham Fadlil*

“Jangan selalu memilih jalan yang mudah seperti air yang selalu mengalir ke tempat
rendah, tiba – tiba kita sudah ada di tempat paling dasar – *Nobisuke Nobi*”

Skripsi ini dipersembahkan spesial untuk:

♥ Bapak dan Ibu

♥ Mas Dito dan Nabila

“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.”

AS-Sajdah : 17

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Hirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Determinan Keberadaan *Risk Management Committee* Pada Perusahaan *Go Public* di Indonesia" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil kepada :

1. Bapak Muhammad Khumaedy dan Ibu Sri Sumarni tersayang, tercinta, dan terhormat, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, cerita, serta do'a yang tak pernah selesai dilantunkan. Terimakasih telah menjadi orang tua, teman, sahabat dan atas segala perjuangan selama ini. *I never be someone without you both.*
2. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, MSi., Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
3. Dr. H.Sugeng Pamudji, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan selama ini.

4. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
5. Drs. Sudarno, M.si, Akt, Ph.D, selaku Dosen Wali, yang telah memberikan pengalaman, motivasi dan ilmu selama penulis menjalankan masa studi.
6. Seluruh Dosen dan segenap staff karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
7. Ditto Pradiptya Satrio dan Nabila Yuarizki Ulina, Kakak dan Adik yang setia mewarnai setiap hari dengan candaan, omelan, cerita, perjalanan, dan makanan.
8. Keluarga Besar Mulyorejo dan Salidi Kartodikromo. Terimakasih atas kebersamaan dan kebahagiaan yang selalu tercipta di antara waktu sibuk kita.
9. Pangestika Ayu Aji Kirana, Nessya Dina Nurdiani, Agustina, Dewi Lupitasari, Kinantya Komala Nur Shabrina, Maretta Yoehana, Oneal Savitri dan Erlina Dyah Hapsari. Hay para wanita, makasih atas persahabatan, cerita, motivasi, ocehan, keriwilan dan keributan selama ini. Terimakasih selalu ada di setiap derai tawa dan air mata yang pernah ada di setiap bagian hidup. Semoga Allah selalu menjaga silaturahmi kita. *Go Girls Power.*

10. Sigit Dwi Kurniawan dan Andreas Widhi Kurniaji, “kakak – kakak” yang selalu ada di setiap waktu, teman cerita, teman menikmati kopi, bercanda, marah, sedih, nangis, seneng, ketawa, dan segalanya yang tidak akan pernah habis.
11. Keluarga Besar IA 5 SMA Negeri 2 Semarang, *especially* PKK ! Setia, Elida, Qthink, Dichil, Ketrin, Happy, Sandra dan Juga Martha ! Makasih buat Persahabatan, Persaudaraan dan kebahagiaan yang akan selalu ada. Semoga semesta alam selalu menjaga kita.
12. “Sayang Mantan Corporation” Arrijal, Wahyu, Galang, Feri, Huda, Theda, Doa, Yanto dan Tantra. Serta Anggi, Leditya, Restria, Alfian dan Leo. Terimakasih atas perjalanan yang tidak pernah ada akhirnya, atas candaan dan kegembiraan yang pernah dan akan selalu ada dalam setiap langkah.
13. Gangster KKN Kendalasesem ! Nora, Linaa , Dessy, Hera, Riko, Ardian, Yoga, Pratik dan Syamsul. Ahhh Makasih pengalaman, cerita, perjalanan dan kehidupan 35 hari plus plus yang terjadi dan seterusnya, semoga kita tetap menjaga silaturahmi yang ada. Serta Keluarga Besar Bapak Shobirin dan Bapak Hasan, beserta Warga Desa Kendalasesem, yang telah menerima Tim II KKN UNDIP dengan ramah dan menyenangkan.
14. Tami, Letsa, Artha, Anis, Edo, Tegar, Ditta, Siddiq, Mbak Diyos, Mas Chandra, Mas Ipank, Mas Tirta, Mas Ryan, Mbak Lala dan temen – temen yang baik semua.

15. Teman – teman Akuntansi Reguler 1 angkatan 2009 atas kebersamaan dan perjalanannya selama ini.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 15 Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Landasan Teori | 11 |
| 2.1.1 <i>Agency Theory</i> | 11 |
| 2.1.2 <i>Signalling Theory</i> | 15 |
| 2.1.3 Manajemen Risiko | 18 |
| 2.1.4 <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia | 19 |
| 2.1.5 <i>Risk Management Committee</i> | 23 |
| 2.1.6 Dewan Komisaris..... | 26 |
| 2.1.7 Komisaris Independen | 28 |
| 2.1.8 Reputasi Auditor Eksternal | 31 |
| 2.1.9 Kompleksitas Perusahaan | 33 |
| 2.1.10 RisikoPelaporan Keuangan | 35 |
| 2.1.11 <i>Leverage</i> | 36 |
| 2.1.12 Ukuran Perusahaan | 37 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 41 |
| 2.4 Hipotesis | 45 |
| 2.4.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris | 45 |
| 2.4.2 Proporsi Komisaris Independen | 46 |
| 2.4.3 Reputasi Auditor Eksternal | 47 |
| 2.4.4 Kompleksitas Perusahaan | 48 |
| 2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan | 49 |
| 2.4.6 <i>Leverage</i> | 50 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel | 52 |
| 3.1.1 Variabel Independen | 52 |
| 3.1.2 Variabel Dependen | 55 |
| 3.1.3 Variabel Kontrol | 56 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 57 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 57 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 58 |
| 3.5 Prosedur Analisis | 59 |
| 3.6 Metode Analisis..... | 60 |
| 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif | 61 |
| 3.6.2 Uji Hipotesis | 61 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS | 66 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian..... | 66 |
| 4.2 Analisis Data | 70 |
| 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif | 70 |
| 4.2.2 Uji Multikolonieritas..... | 82 |
| 4.2.3 Menilai Model Fit..... | 84 |
| 4.2.3.1 Uji Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model</i>) | 84 |
| 4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi | 86 |
| 4.2.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi..... | 88 |
| 4.2.3.4 Matriks Klasifikasi | 90 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.4 Uji Koefisien Regresi | 92 |
| 4.2.4.1 Hipotesis 1 | 93 |
| 4.2.4.2 Hipotesis 2 | 94 |
| 4.2.4.3 Hipotesis 3 | 95 |
| 4.2.4.4 Hipotesis 4 | 95 |
| 4.2.4.5 Hipotesis 5 | 96 |
| 4.2.4.6 Hipotesis 6 | 97 |
| 4.2.4.7 Variabel Kontrol (Ukuran Perusahaan) | 97 |
| 4.3 Interpretasi Hasil | 100 |
| 4.3.1 Hipotesis 1 | 100 |
| 4.3.2 Hipotesis 2 | 101 |
| 4.3.3 Hipotesis 3 | 104 |
| 4.3.4 Hipotesis 4 | 106 |
| 4.3.5 Hipotesis 5 | 106 |
| 4.3.6 Hipotesis 6 | 107 |
| 4.3.7 Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan | 109 |
| BAB V PENUTUP | 111 |
| 5.1 Simpulan | 112 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 113 |
| 5.3 Saran | 114 |
| DAFTAR PUSTAKA | 115 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | 118 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| TABEL 2.1 Kantor Akuntan Publik <i>Big Four</i> | 32 |
| TABEL 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 40 |
| TABEL 4.1 Ringkasan Jumlah Sampel Penelitian..... | 68 |
| TABEL 4.2 Distribusi Keberadaan <i>Risk Management Committee</i> (RMC).... | 69 |
| TABEL 4.3 Distribusi Keberadaan <i>Separate Risk Management Committee</i> (SRMC)..... | 70 |
| TABEL 4.4 Statistik Deskriptif RMC | 72 |
| TABEL 4.5 Statistik Deskriptif SRMC..... | 72 |
| TABEL 4.6 Distribusi Kantor Akuntan Publik (KAP) Perusahaan Sampel .. | 75 |
| TABEL 4.7 Distribusi Kantor Akuntan Publik (KAP) Perusahaan Sampel yang Memiliki <i>Risk Management Committee</i> (RMC)..... | 76 |
| TABEL 4.8 Distribusi Kantor Akuntan Publik (KAP) Perusahaan Sampel yang Tidak Memiliki <i>Risk Management Committee</i> (RMC)..... | 76 |
| TABEL 4.9 Distribusi Kantor Akuntan Publik (KAP) Perusahaan Sampel yang Memiliki <i>Risk Management Committee</i> (RMC) Tergabung | 78 |
| TABEL 4.10 Distribusi Kantor Akuntan Publik (KAP) Perusahaan Sampel yang Memiliki <i>Separate Risk Management Committee</i> (SRMC)..... | 79 |
| TABEL 4.11 Uji Multikolonieritas Regresi I | 83 |
| TABEL 4.12 Uji Multikolonieritas Regresi II | 83 |
| TABEL 4.13 Uji <i>Overall Fit Model</i> | 85 |
| TABEL 4.14 Uji Koefisien Determinasi Regresi I | 87 |
| TABEL 4.15 Uji Koefisien Determinasi Regresi II..... | 88 |
| TABEL 4.16 Uji Kelayakan Model I | 89 |
| TABEL 4.17 Uji Kelayakan Model II | 89 |
| TABEL 4.18 Matriks Klasifikasi Regresi I | 90 |
| TABEL 4.19 Matriks Klasifikasi Regresi II..... | 91 |
| TABEL 4.20 Uji Koefisien Regresi I | 92 |

| | |
|---|----|
| TABEL 4.21 Uji Koefisien Regresi II | 93 |
| TABEL 4.22 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis..... | 99 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 KerangkaPemikiran I..... | 43 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran II..... | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang dilakukan dalam menganalisis determinan keberadaan *risk management committee* pada perusahaan *go public* di Indonesia. Selain itu, akan dijelaskan pula tentang rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. Selengkapnya dapat dilihat pada sub – bab ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan BNI pada tahun 2003 mengalami kebobolan akibat transaksi surat kredit atau *letter of credit* (L/C) fiktif, yaitu penyimpangan terhadap prosedur bank. Penyimpangan terhadap prosedur bank tersebut berupa surat kredit (L/C) yang diterbitkan bukan berasal dari bank koresponden, syarat – syarat surat kredit (L/C) yang tidak terpenuhi, diskonto yang dilakukan sebelum akseptasi *opening bank* (Bank Pembuka L/C), sampai dengan pemalsuan dokumen surat kredit (L/C). Alasan mendasar kasus tersebut bisa terjadi pada BNI adalah akibat tidak diterapkannya Manajemen Risiko, sehingga BNI tidak mampu mendeteksi dan mencegah risiko yang akan dihadapi oleh Perusahaan.

Bank Indonesia di tahun 2003 telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko pada Bank di Indonesia, dimana

setiap perbankan di Indonesia wajib menyerahkan rencana aksi (*action plan*) mengenai penerapan Manajemen Risiko. Peraturan tersebut hanya mewajibkan perbankan untuk menyerahkan *action plan* penerapan Manajemen Risiko, bukan mewajibkan adanya manajemen risiko pada perusahaan. Pada tahun 2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Pembentukan Komite Pemantau Risiko harus dibentuk paling lambat pada akhir tahun 2007, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut akan mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia.

Pembentukan RMC pada perbankan telah diwajibkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. Namun, pembentukan Komite Manajemen Risiko bagi perusahaan non perbankan merupakan hal yang baru, karena pada dasarnya pembentukan RMC di perusahaan non perbankan di Indonesia masih bersifat sukarela karena belum adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan (Perbankan dan non Perbankan) di Indonesia untuk membentuk Manajemen Risiko pada tata kelola perusahaan.

Bagi dunia Internasional, penerapan Manajemen Risiko mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya inisiatif perusahaan dalam penerapan *good corporate governance*, hal tersebut terjadi akibat skandal akuntansi yang dialami oleh Enron dan Worldcom. Peningkatan tata kelola perusahaan ditekankan pada peranan dari Manajemen Risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009), karena sistem Manajemen

Risiko yang efektif dan efisien serta mampu memenuhi kualitas yang ada akan membuat perusahaan mencapai tujuan usaha dalam meningkatkan penyajian laporan keuangan sehingga mampu menjaga reputasi perusahaan.

Berdasarkan data Laporan Inflasi Bank Indonesia tahun 2012, keadaan ekonomi Indonesia selama tahun 2012 yang diukur berdasarkan tingkat inflasi *year-on – year* bulan September sebesar 4,31 % masih dianggap berada pada standar inflasi rendah karena berada antara nilai 0 – 9,9%. Pada faktanya, keadaan ekonomi Indonesia tidak hanya diukur oleh tingkat inflasi saja, sehingga membuat perusahaan bersaing dengan sistem perusahaan yang kompleks serta meningkatkan kualitas mereka dalam menghadapi keadaan yang penuh risiko. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan pengungkapan Manajemen Risiko perusahaan. Sistem Manajemen Risiko merupakan salah satu perangkat utama dalam mengurangi dan menghadapi risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Informasi yang berasal dari Manajemen Risiko digunakan oleh pihak internal yaitu perusahaan itu sendiri dan pihak eksternal yaitu investor, pemasok, kreditur dan pemegang saham. Pihak internal perusahaan membutuhkan informasi dari Manajemen Risiko sebagai dasar untuk melakukan analisis risiko perusahaan agar *feed back* yang diharapkan oleh pihak internal mampu diterima dengan maksimal.

Dewan Komisaris merupakan penanggung jawab pengawasan tertinggi pada perusahaan serta melaksanakan fungsi pengawasan atas Manajemen Risiko. Sistem Manajemen Risiko pada perusahaan berfungsi sesuai aturan yang ada, agar risiko

material yang dihadapi perusahaan mendapatkan perhatian dari Dewan Direksi. Sehingga implementasinya adalah Dewan Direksi langsung memberikan aksi atas risiko material tersebut, berupa memahami dan mengevaluasi secara mendalam atas risiko material tersebut dan melakukan aksi selanjutnya yaitu menanggapi risiko tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 menyatakan bahwa Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Sedangkan *Risk Management Committee* (RMC) sebagai sebuah komite pengawas manajemen yang terpisah dari Komite Audit dan berdiri sendiri, yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem Manajemen Risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level Dewan Komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001) dalam Subramaniam, *et al.*, (2009).

Pembentukan RMC memiliki perkembangan signifikan pada tahun – tahun terakhir ini, penelitian sebelumnya membuktikan bahwa 80 Dewan Direksi dari 200 perusahaan di Australia mengungkapkan bahwa 54% responden organisasi telah mendirikan RMC, bahkan 70% dari responden yang telah mendirikan RMC, memiliki RMC yang diintegrasikan dengan Komite Audit (Subramaniam, *et al.*, 2009). Terdapat keprihatinan yang meningkat atas struktur pada perusahaan, yaitu pembentukan dewan sub – komite dan hubungan antar komite tersebut. Pembentukan

dewan sub – komite secara sistematis berkaitan dengan faktor atas tata kelola organisasi, seperti komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan oleh organisasi dan ukuran organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan KPMG tahun 2005 (Subramaniam, *et al.*, 2009) pembentukan RMC secara umum tergabung dengan Komite Audit, hal tersebut membuat beberapa pihak melakukan kritik dan memberikan tindakan skeptis atas kinerja dari RMC, terutama ketika RMC yang tergabung dalam Komite Audit bertanggung jawab penuh atas pelaporan keuangan dan Manajemen Risiko, sehingga tekanan atas rendahnya tingkat efisiensi RMC dan Komite Audit tersebut terlihat semakin jelas.

Dalam penerapannya RMC dipisahkan menjadi 2 jenis, yaitu RMC yang berdiri independen (terpisah dari Komite Audit) dan RMC gabungan (tergabung dengan Komite Audit). RMC yang berdiri independen atau umumnya disebut *separate* RMC (SRMC), yang dipandang memiliki pengendalian yang lebih baik ketimbang RMC gabungan, karena pada dasarnya Manajemen Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengelola dan memantau dalam hal meminimalkan risiko, sehingga ketika RMC yang dibentuk oleh perusahaan adalah RMC yang terpisah dengan Komite Audit (SRMC) maka RMC tersebut akan lebih fokus dalam menjalankan tugasnya yaitu memantau dan meminimalkan risiko. RMC memberikan jalan bagi Dewan Komisaris dalam mengendalikan dan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan peluang yang dihadapi oleh perusahaan. SRMC akan memberikan kesempatan bagi anggota komite untuk memberikan fokus utama yang lebih banyak

komposisinya pada proses penanganan risiko, sehingga kualitas pemantauan internal akan lebih baik ketimbang RMC gabungan. Menurut Alles, *et al.*, (2005). Sebuah RMC gabungan dan Komite Audit tidak hanya mengawasi risiko manajemen tapi secara aktif juga terlibat dengan pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit, yang akan menyebabkan fokus utama atas pemantauan risiko akan berkurang.

Penelitian ini dibuat dengan mengacu penelitian yang telah dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009). Penelitian yang dilakukan Subramaniam, *et al.*, (2009) menguji hubungan antara karakteristik perusahaan dan karakteristik Dewan Komisaris perusahaan terhadap pengungkapan RMC dan tipe RMC yang dibentuk oleh perusahaan. Penelitian ini dimotivasi juga oleh kenaikan signifikan atas pembentukan RMC, terutama pembentukan SRMC (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Pada penelitian ini, sampel perusahaan yang digunakan adalah seluruh tipe perusahaan kecuali tipe perusahaan keuangan dan perbankan. Penelitian ini menggunakan kembali variable yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009), kecuali variabel tipe perusahaan dan *Independent Chairman*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009) adalah menguji variabel – variabel tersebut pada wilayah yang berbeda yaitu Indonesia. Pembentukan Komite Manajemen Risiko di Indonesia hanya diwajibkan bagi perusahaan perbankan, sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk melihat tingkat ketaatan perusahaan non perbankan dalam penerapan *Good Corporate Governance*.

1.1 Rumusan Masalah

Aspek pengawasan dan pengendalian merupakan kunci terbentuknya sistem Manajemen Risiko pada perusahaan, dengan terjalannya sistem pengawasan dan pengendalian yang berkualitas mampu memberikan dampak yang positif bagi kinerja perusahaan. Pada beberapa perusahaan yang ada, fungsi dan tugas dari Komite Manajemen Risiko sebagai pengawas dan pengendali risiko perusahaan berada di tangan Komite Audit. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan bagi beberapa pihak, apakah pengawasan risiko yang didelegasikan kepada Komite Audit mampu berjalan efektif dan efisien, terutama dalam pengendalian risiko perusahaan. Karena itu, pembentukan RMC yang berdiri secara independen (SRMC) memberikan peran tersendiri dalam pengawasan dan pengendalian atas Manajemen Risiko secara khusus dan lebih fokus. Masih terbatasnya keberadaan RMC terutama SRMC yang dibentuk oleh perusahaan memotivasi penelitian ini dalam melihat tingkat ketaatan perusahaan dalam pengendalian risiko dari segi keberadaan RMC sebagai komite yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap Manajemen Risiko perusahaan, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah anggota Dewan Komisaris berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC ?
2. Apakah Komposisi Komisaris Independen berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC ?

3. Apakah reputasi auditor eksternal berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC ?
4. Apakah kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC ?
5. Apakah risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC ?
6. Apakah *leverage* berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC?

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan. Beberapa tujuan yang terkait dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti bahwa jumlah Dewan Komisaris berhubungan positif dengan keberadaan RMC.
2. Memberikan bukti bahwa komposisi Komisaris Independen berhubungan positif dengan keberadaan RMC.
3. Memberikan bukti bahwa reputasi auditor eksternal berhubungan positif dengan keberadaan RMC..
4. Memberikan bukti bahwa kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

5. Memberikan bukti bahwa risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan keberadaan RMC.
6. Memberikan bukti bahwa *leverage* berhubungan positif dengan keberadaan RMC.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai keberadaan *Risk Management Committe* pada perusahaan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menganalisis ketaatan *Good Corporate Governance* yang telah dijalankan oleh perusahaan *go public* di Indonesia.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , serta sistematika penulisan.

2. Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

3. Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan deksripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

5. Bab V : Penutup

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

BAB II menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan pada penelitian yang dilakukan dalam menganalisis determinan keberadaan *risk management committee* pada perusahaan *go public* di Indonesia. Selain itu, akan dijelaskan pula hasil penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang sejenis dengan penelitian ini. Secara sistematis, BAB II mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

2.1 Landasan Teori

Pada sub – bab landasan teori disajikan 2 teori utama yang mendukung penelitian ini, yaitu *Agency Theory* dan *Signalling Theory*, serta teori pendukung yang digunakan dalam menjelaskan variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory merupakan teori yang digunakan dalam menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) antara dua individu, yaitu *principal* dengan *agent*. *Agent* melakukan sebuah kontrak jasa dengan *principal* untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu, dan *principal* memberi *fee* kepada agen atas jasa tersebut (Subramaniam, *et al.*, 2009). Karena *principal* selalu tertarik dengan

hasil – hasil yang diberikan oleh *agent*, disinilah teori keagenan memberikan landasan bagi peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi atas suatu kejadian.

Saat ini yang terjadi dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan dipisahkan dari sistem kepemilikan perusahaan. Pemisahan fungsi tersebut dilandasi oleh *Agency Theory*, teori ini menekankan pentingnya pemilik perusahaan mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan kepada manajerial yang profesional (*agent*) untuk menjalankan kegiatan sehari – hari. Peran *agent* disini adalah melaksanakan kepentingan dari perusahaan dan menjalankan fungsi manajemen perusahaan, sedangkan pemilik perusahaan (*principal*) hanya bertugas mengawasi jalannya perusahaan yang dijalankan oleh manajemen, *principal* disini bisa termasuk pemegang saham maupun investor perusahaan.

Agency Theory mendasari hubungan antara *principal* dan *agent* sulit tercipta karena perbedaan preferensi yang tidak selaras atau kepentingan yang bertentangan (*conflict of interest*) (Meisser, *et al.*, 2008). Perbedaan tersebut yang menimbulkan permasalahan yang disebut asimetris informasi, yaitu keadaan dimana ketika distribusi informasi yang diketahui kedua belah pihak tidak lengkap atau tidak seimbang antara informasi yang diterima oleh *principal* atau *agent*, sehingga konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh *principal* maupun *agent*. Umumnya asimetris informasi terjadi dalam keadaan manajer secara umum

memiliki lebih banyak informasi mengenai keadaan yang sebenarnya daripada pemilik, yang umumnya tidak ada di tempat (*absentee owner*). Asimetris informasi dapat menimbulkan permasalahan atau *agency problem* yang disebabkan karena kesulitan *principal* dalam melakukan kontrol atau pengamatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat dua macam *agency problem* yaitu :

1. *Moral – Hazard*

Keadaan dimana pemilik tidak mampu melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap perilaku manajer, sehingga aksi yang dilakukan berbeda dengan yang diharapkan oleh pemilik. Keadaan itu terjadi karena perbedaan preferensi yang terjadi atau penipuan yang dilakukan oleh manajemen.

2. *Adverse Selection*

Keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar – benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Agency Theory mengasumsikan bahwa *principal* maupun *agent* bertindak atas kepentingan mereka sendiri, ketika terjadi masalah antara *agent* dan *principal* dalam perusahaan, yang dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan konflik dalam hubungan tersebut. Konflik antara *agent* dan *principal* dalam *Agency Theory* disebut dengan *Agency Conflict*. *Agency Conflict* terjadi ketika para manajer ingin memaksimalkan tingkat kepuasannya sendiri, di pihak lain pemilik perusahaan menginginkan keuntungannya yang maksimal. *Agency Conflict* timbul pada berbagai hal berikut :

1. *Moral Hazard*

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

2. *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif.

3. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam keadaan ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman (*low risk*) dan masuk dalam batas aman kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah risiko (*high risk*) bagi perusahaan, walaupun mungkin investasi dalam kategori *low risk* bukan pilihan yang terbaik bagi perusahaan.

4. *Time Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cashflow* perusahaan sepanjang periode waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengambilan akuntansi yang tinggi dan kurang atau tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengambilan NPV yang jauh lebih besar.

(Alijoyo dan Zaini , 2004)

Conflict tersebut mampu mempengaruhi kualitas keputusan yang dibuat oleh manajer (Hendriksen, 1992). *Principal* melakukan penilaian atas kinerja *agent* berdasarkan pendekatan teleologis, yaitu berdasarkan kemampuan *agent* dalam memperbesar laba yang akan digunakan dalam pengalokasian deviden, karena

semakin tinggi nilai laba maka harga saham dan deviden yang dibagikan akan semakin besar, berdasarkan hal tersebut *agent* layak mendapatkan insentif tinggi atas kinerja baik yang telah mereka lakukan. Begitu juga dengan *agent*, mereka akan memenuhi tuntutan *principal* untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi bagi pribadi mereka sendiri. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh *principal* terkesan longgar, maka *agent* dapat memainkan kondisi perusahaan dimana seolah – olah target yang telah ditentukan sebelumnya telah tercapai.

Penggunaan *Agency Theory* telah banyak digunakan pada penelitian – penelitian sebelumnya, khususnya mengenai keberadaan komite – komite di bawah wewenang Dewan Komisaris, komite-komite tersebut merupakan mekanisme pengawasan internal di dalam perusahaan dan keberadaan komite pengawas internal tersebut dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang salah satu fungsinya adalah menyediakan kualitas pengawasan yang lebih baik dan menuntun untuk menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Keberadaan komite – komite tersebut diharapkan mampu mengurangi *agency problem* yang ada di dalam perusahaan.

2.1.2 *Signalling Theory*

Teori *Signalling* digunakan untuk mengatasi masalah asimetris informasi yang terjadi dalam pasar. Untuk mengurangi asimetris informasi yang terjadi, perusahaan akan mengungkapkan seluruh informasi yang dimiliki oleh perusahaan berupa informasi keuangan maupun non keuangan, semua itu dilakukan untuk menciptakan citra yang menguntungkan di pasar. Ketika sebuah perusahaan mengungkapkan

informasi sebanyak mungkin bagi pihak eksternal, perusahaan tersebut dianggap memiliki tata kelola yang baik karena memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Berbeda ketika perusahaan berusaha untuk mengurangi informasi yang ada, pihak eksternal akan merasa kesulitan dalam pengambilan keputusan karena sedikitnya informasi yang didapatkan.

Signalling Theory juga menunjukkan konsistensi yang besar terhadap adanya pengungkapan yang luas, yaitu bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi dengan baik berarti perusahaan tersebut mengasingkan diri dan memiliki kesan yang kurang baik, yaitu bersifat kurang informatif terhadap pasar mengenai keberadaannya. Saat informasi diumumkan dan semua pelaku pasar telah menerima informasi tersebut, pelaku pasar akan melakukan proses interpretasi dan analisis atas informasi tersebut, lalu memutuskan apakah informasi tersebut merupakan kabar baik (*good news*) atau kabar buruk (*bad news*). Apabila informasi tersebut dianggap sebagai *good news*, maka terjadi peningkatan atas volume perdagangan saham. Pemberian informasi oleh perusahaan dianggap para pengguna informasi bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang (*good news*), sehingga para pengguna informasi secara singkat akan mengungkap kualitas dari perusahaan berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusahaan, ketika semakin banyak informasi yang diberikan maka semakin baik kualitas perusahaan tersebut.

Dalam hubungan antara *agent* dan *principal*, Teori *Signalling* mendasari perilaku *agent* dalam mengolah informasi yang akan diberikan kepada *principal* agar sesuai dengan keinginan dan mampu memuaskan atau mengandung *good news*. *Good news* dianggap mampu memprediksi prospek perusahaan di masa yang datang akan menjadi lebih baik, para pengguna informasi yaitu *principal* menganggap informasi yang mengandung *good news* dan lebih banyak itu lebih baik dalam mengukur prediksi perusahaan, walaupun informasi yang mengandung *bad news* di hilangkan oleh *agent*.

Salah satu pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan atas keberadaan *Risk Management Committee* dalam tata kelola perusahaan. Ketika perusahaan memiliki keberadaan *Risk Management Committee*, pihak pengguna informasi menganggap bahwa perusahaan telah memiliki komitmen yang cukup besar dalam mengendalikan, memantau dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Subramaniam, *et al.*, (2009), yang menyatakan bahwa perusahaan akan dianggap memiliki tata kelola yang baik ketika perusahaan tersebut melakukan pengungkapan atas RMC, pengungkapan tersebut dipandang dapat meminimalkan potensi risiko atau meningkatkan nilai perusahaan. Menurut teori *signaling*, perusahaan dengan kompleksitas tinggi atau berada di industri yang dinamis akan melaksanakan strategi untuk mendapatkan pengakuan atas *good governance*.

2.1.3 Manajemen Risiko

Keadaan usaha yang penuh dengan ketidakpastian, menimbulkan risiko usaha yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen secara langsung tidak mampu menghindari risiko. Namun, risiko yang ada dan akan dihadapi mampu diolah, sehingga akan menghindarkan perusahaan dari kondisi yang tidak diharapkan. Cara – cara yang dilakukan perusahaan untuk mengolah risiko tersebut disebut dengan manajemen risiko.

Risiko dapat diminimalkan melalui Manajemen Risiko, Manajemen Risiko tersebut bertujuan untuk mengelola risiko yang ada, sehingga organisasi mampu bertahan. Kesadaran yang tinggi terhadap Manajemen Risiko timbul akibat beberapa kejadian yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan kegagalan yang tidak diharapkan. menurut ICAEW (2002), Proses Manajemen Risiko secara umum melibatkan langkah-langkah seperti berikut ini :

1. Pengidentifikasian risiko – risiko yang mungkin mengancam kegiatan operasi perusahaan, analisis dan penilaian profitabilitas serta dampak potensial risiko yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan.
2. Pemilihan teknik yang sesuai untuk menangani risiko berdasarkan pada probabilitas terjadinya risiko tersebut dan dampak yang dihasilkannya apakah dengan menghindari risiko (*risk avoidance*), mengurangi risiko (*risk reducting*), *risk retention* dengan membentuk cadangan, *risk deferral* atau mentransfer risiko (*risk transfer*) pada pihak lain seperti perusahaan asuransi sesuai dengan strategi perusahaan.
3. Mengimplementasikan pengendalian untuk mengelola risiko yang tersisa
4. Mengawasi keefektivitasan Manajemen Risiko.

5. Belajar dari pengalaman dan membuat perbaikan terhadap Manajemen Risiko
Manajemen Risiko perusahaan membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan peluang dengan tujuan yang digunakan untuk mempertinggi nilai. Oleh karena itu, struktur Manajemen Risiko yang tepat dapat membantu dalam mengelola risiko bisnis secara lebih efektif dan mengungkapkan hasil Manajemen Risiko kepada stakeholders organisasi (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Organisasi semestinya mampu mendefinisikan dan membuktikan kebenaran dan kebijakan Manajemen Risiko, karena kebijakan Manajemen Risiko pada hakikatnya harus relevan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Peranan dari Manajemen perusahaan disini adalah sebagai pengendali atas kebijakan Manajemen Risiko tersebut, sehingga mampu dipahami dan diimplementasikan.

2.1.4 *Good Corporate Governance* Indonesia

Para pelaku bisnis di seluruh dunia saat ini lebih fokus membicarakan mengenai *Good Corporate Governance* atau dikenal dengan akronim GCG. Salah satu faktor yang membuat *Good Corporate Governance* menjadi topik utama di dunia bisnis adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi di dunia, krisis ekonomi tersebut membuat masyarakat menuntut setiap manajemen perusahaan melakukan pertanggungjawaban yang baik dan benar atas pengelolaan perusahaannya, sehingga mendorong pihak internal perusahaan dalam perbaikan sistem tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* yang telah ada menjadi lebih baik.

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut *Forum for Good Corporate Governance Indonesia* (FCGI) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pengimplementasian *Good Corporate Governance* di ASEAN terjadi ketika dibentuknya *The Asean Capital Market Forum* (ACMF) akibat dari perkembangan dan semakin terintegrasinya pasar modal di dunia. Salah satu strategi untuk mendukung tercapainya tujuan integrasi tersebut sebagaimana tercantum dalam *Implementation Plan* adalah dengan memperkuat penerapan aspek *Good Corporate Governance* perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah ASEAN (dalam Kajian Tentang Pedoman *Good Corporate Governance* di Negara – Negara Anggota ACMF)

Pedoman umum *Good Corporate Governance* di Indonesia disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang diterbitkan pada tahun 2006. Penerapan pedoman tersebut bersifat *comply and explain*. di mana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman *Good Corporate Governance* ini. Apabila seluruh aspek pedoman ini belum dilaksanakan seluruhnya, maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan, namun demikian mengingat pedoman ini hanya merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya diharapkan diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-

masing industri maka penerapan ini bersifat *voluntary* dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini. Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governacen* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, menguraikan asas *Good Corporate Governance* yaitu :

- a. Transaparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Responsibilitas
- d. Indepedensi
- e. Kewajaran dan Kesetaraan

Keberhasilan penegakan *Good Corporate Governance* sangat ditentukan oleh kualitas pimpinannya yaitu Komisaris sebagai pengawas dan Direksi sebagai pelaksana. Dalam mekanisme *Corporate Governance*, Dewan Komisaris memiliki peranan dan tugas yang sangat penting. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat memberikan kontribusi terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi yang relevan bagi para *stakeholders* (Indah, 2011).

Ada dua bentuk sistem manajemen yang berbeda yang diungkapkan oleh FCGI berdasarkan bentuk Dewan dalam sebuah perusahaan, bentuk tersebut berdasarkan dua sistem hukum yang berbeda. Yang pertama adalah sistem Hukum Anglo Saxon yang mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*, disini

perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau *Executive Director* dan Direktur Independen atau *non Executive Director*, negara yang menerapkan *One Tier System* Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua adalah Sistem Hukum Kontinental Eropa yang mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tier System*, disini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Dewan Manajemen atau Dewan Direksi, Negara yang menerapkan *Two Tier System* adalah Jerman, Jepang, Belanda dan Indonesia.

Pada *One Tier System*, peran Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Dewan Direksi sebagai pelaksana dibentuk dalam sebuah kesatuan yang disebut *Board of Director*, kesatuan ini membuat peran dari pengawas dan pelaksana tidak jelas pemisahannya. Berbeda dengan *Two Tier System*, peran antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terlihat jelas, fungsi pengambil kebijakan dijalankan oleh Dewan Direksi dan fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Komisaris. Menurut FCGI, peranan Dewan Komisaris dalam sebuah perusahaan meliputi :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

4. Memonitor pelaksanaan *corporate governance*, dan mengadakan perubahan pada bagian yang diperlukan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. (*OECD Principles of Corporate Governance*)

Dewan Komisaris dapat membentuk berbagai komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas pelaksanaan yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Hal itu dimaksudkan membantu peran Dewan Komisaris yang begitu luas. Menurut Harrison (dalam Subramaniam, *et al.*, 2009) ada dua tipe Dewan Komisaris, tipe yang pertama merupakan komite yang menjalankan peranan penting dalam memberikan masukan kepada manajemen dan Dewan Komisaris pada pengambilan keputusan bisnis yang penting bagi perusahaan, contohnya yaitu komite Perencanaan Strategis. Tipe yang kedua berhubungan dengan fungsi monitoring atau pengawasan dari dewan, seperti Komite Audit, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi. Komite-komite tersebut secara spesifik dapat meningkatkan akuntabilitas dari dewan sebagaimana mereka menyediakan pengawasan independen dari berbagai aktivitas dewan.

2.1.5 Risk Management Committee

di dalam perusahaan peranan Manajemen Risiko ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas langkah – langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi risiko ekonomi. Berdasarkan kajian tentang pedoman *Good Corporate Governance* oleh BAPPEPAM – LK Indonesia, Komite Manajemen Risiko yang di peraturan tersebut di beri nama Komite Kebijakan Risiko,

merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Pembentukan komite tersebut difungsikan untuk membantu tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, namun yang tercantum di dalam peraturan tersebut hanya menekankan pada pembentukan Komite Audit, sedangkan komite lainnya seperti Komite Kebijakan Risiko dibentuk sesuai kebutuhan.

Indikasi suatu kerangka *Corporate Governance* yang terpadu adalah dibentuknya suatu komite yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Manajemen Risiko, faktor pendukung lainnya adalah mendorong perusahaan membentuk Komite Manajemen Risiko, dengan fungsi membantu perusahaan menghadapi peningkatan risiko yang akan dihadapi. Saat ini, keberadaan RMC dirasa sebagai sebuah pengawasan penting bagi Dewan Direksi (Fields and Keys, dalam Subramaniam, *et al.*, 2009).

RMC dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung Dewan Komisaris dalam tanggungjawabnya terhadap pengawasan risiko, Manajemen Risiko dan pengendalian internal (Subramaniam, *et al.*, 2009). Dengan membentuk sebuah komite khusus, seperti *Risk Management Committee* akan memungkinkan untuk mencurahkan waktu dan usaha yang lebih banyak dengan menyatukan berbagai risiko dan mengevaluasi pengendalian yang berhubungan secara keseluruhan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Komite Pemantau Risiko yang sekurangnya memiliki fungsi untuk melaksanakan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta melakukan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko di tingkat Manajerial Perusahaan. Keberadaan *Risk Management Committee* perusahaan harus berfungsi secara efektif dengan mempertimbangkan peranan dan fungsi *Risk Management Committee* bagi perusahaan.

Dalam penerapannya *Risk Managemnet Committee* atau RMC dipisahkan menjadi 2 jenis, yaitu RMC yang berdiri independen (terpisah dari Komite Audit) dan RMC gabungan (tergabung dengan Komite Audit). RMC yang berdiri independen atau umumnya disebut *separate RMC* (SRMC) memiliki pengendalian yang lebih baik ketimbang RMC gabungan, karena pada hakikatnya fungsi dari Manajemen Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengelola dan memantau dalam hal meminimalkan risiko. RMC memberikan jalan bagi Dewan Direksi dalam mengendalikan dan meminimalkan ancaman dan peluang yang dihadapi oleh entitas. di lain sisi, *Risk Management Committee* yang terpisah atau SRMC akan memberikan kesempatan bagi anggota komite untuk memberikan fokus utama pada proses penanganan risiko, sehingga kualitas pemantauan internal akan lebih baik ketimbang RMC gabungan. RMC yang tergabung dengan Komite Audit pada fungsinya tidak berperan maksimal dalam pengawasan atas manajemen risiko, namun dituntut untuk aktif terlibat dalam pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit perusahaan.

Umumnya RMC yang dibentuk perusahaan tergabung dengan Komite Audit, hal tersebut terjadi karena peraturan akan pembentukan komite dibawah Dewan Komisaris hanya mewajibkan pembentukan Komite Audit, sehingga perusahaan akan

memfokuskan diri untuk membentuk Komite Audit saja dan menjadikan pembentukan komite lain selain Komite Audit sebagai pilihan tambahan lainnya. di Indonesia peraturan tersebut bisa dilihat dari kajian *Good Corporate Governance* oleh BAPPEPAM – LK, berbeda dengan perusahaan finansial perbankan, dimana pembentukan komite Manajemen Risiko sudah diatur dengan jelas melalui PBI Nomor 8/4/PBI/2006.

Beberapa pernyataan pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa, RMC tidak akan efisien ketika bergabung dengan Komite Audit (Collier, 1993 ; Ruigrok *et al.*, 2006 ; Turpin and DeZoort, 1998 dalam Subramaniamm *et al.*, 2009). Ketika sebuah Komite Manajemen Risiko tergabung dengan Komite Audit, mereka tidak akan fokus dan menjadikan penanggulangan risiko sebagai tugas utama mereka, karena tugas dan fungsi utama dari penanggulangan dan meminimalkan risiko telah bersinergi secara khusus dengan tugas dari Komite Audit dan dalam jangka yang tidak diperkirakan fungsi penanggulangan risiko akan memiliki proporsi yang lebih sedikit.

2.1.6 Dewan Komisaris

Indonesia menganut tata kelola perusahaan *two tier system*, dimana Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing – masing, yaitu Dewan Komisaris bertanggung

jawab melaksanakan fungsi pengawasan dan Dewan Direksi melaksanakan fungsi manajemen.

Dewan Komisaris yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Dewan Direksi, berperan serta dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, walaupun Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance*, agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berjalan efektif maka perlu memenuhi prinsip – prinsip :

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai dengan pemberhentian sementara.

Keberadaan RMC berhubungan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris, seperti argumentasi yang diungkapkan dalam Subramaniam, *et al.*, (2009), ketika jumlah anggota Dewan Komisaris semakin besar maka kemungkinan untuk menemukan Direksi dengan kemampuan yang lebih dalam mengkoordinasi *corporate governance* dan perusahaan akan terlibat secara lebih dalam meminimalkan risiko dengan pembentukan RMC. Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indoensia, jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan

kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Dalam suatu perusahaan, jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berbeda-beda. Jumlah anggota dewan (baik Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) yang besar dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam bagi perusahaan. Jumlah anggota Dewan Komisaris setidaknya harus lebih besar atau paling tidak sama dengan jumlah anggota Dewan Direksi, karena apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Dewan Direksi, maka akan terdapat kemungkinan anggota Dewan Komisaris mendapat tekanan psikologis jika terdapat perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut atau dengan pengertian lain, komposisi antara pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi tidak seimbang dan berakibat tidak efektifnya sistem pengawasan yang dilaksanakan.

2.1.7 Komisaris Independen

Dewan Komisaris sangat penting peranannya dalam mekanisme pengawasan dan pemantauan perilaku manajer sehingga mampu menghasilkan sebuah hasil mengenai kualitas perusahaan tersebut, berdasarkan akuntabilitas dan pengungkapan sukarela. Dalam *two tier system* keberadaan *Executive Director* yang membentuk RMC berada dibawah Dewan Komisaris, dan keberadaan Komisaris Independen telah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh KNKG.

Pada Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Emiten Dan Perusahaan Publik, UUPT menyatakan bahwa perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih Komisaris Independen yang merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Oleh karena itu. Sehingga dapat meningkatkan peran dari Dewan Komisaris, yang berakibat terciptanya *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No : Kep-305/BEJ/07-2004 di dalam pencatatan efek nomor I-A yang menyatakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki :

- a. Komisaris Independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh anggota komisaris
- b. Komite Audit
- c. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Dalam Peraturan Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Kriteria Komisaris Independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam-LK, yaitu :

- a. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Tidak mempunyai saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan, persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-339/BEJ/07-2001 menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.
- d. Memahami peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal.

Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih aktif dalam pengendalian risiko dan akan lebih banyak mengungkapkan RMC sebagai sumber utama mereka dalam pengendalian Manajemen Risiko. Pada lain sisi, perusahaan dengan proporsi

Komisaris Independen lebih besar, diprediksikan akan mengungkapkan RMC yang terpisah dengan Komite Audit atau SRMC (*Risk Management Committee Separate*).

2.1.8 Reputasi Auditor Eksternal

Kantor Akuntan Publik adalah satu satu organisasi bisnis yang bergerak pada sektor jasa dan merupakan dunia industrial jasa yang relatif kompetitif. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 43/KMK/017/1997 tentang jasa Kantor Akuntan Publik, pasal 1 butir b, mendefinisikan Kantor Akuntan Publik sebagai berikut : “Lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya”.

Ada empat Kantor Akuntan Publik terbesar di Amerika Serikat yang disebut Kantor Akuntan Publik Internasional dengan julukan “*The Big Four* ” masing-masing memiliki kantor disetiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Keempat Kantor Akuntan Publik ini menyelenggarakan audit-audit bagi hampir semua perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan seluruh dunia dan perusahaan lainnya yang lebih kecil. Sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. The Big Four diwakili kepentingannya oleh Kantor Akuntan Publiknya di Indonesia. Daftar partner KAP Indonesia dan partner mereka di *Big Four* adala sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kantor Akuntan Publik *Big Four*

| The Big Four | Partner di Indonesia |
|--------------------------|--------------------------------|
| Price Waterhouse Coopers | Haryanto Sahari & Rekan |
| Ernest & Young | Purwantono, Sarwoko & Sandjaja |
| Deloitte Touche Tohmatsu | Osman Bing Satrio dan Rekan |
| KPMG | Sidharta, Sidharta & Widjaja |

Sumber : *Annual Report* , 2011

Auditor eksternal bagi sebuah perusahaan merupakan kunci utama dalam memantau mekanisme suatu perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) secara umum mampu meningkatkan kontrol internal dari klien, yaitu perusahaan. Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa sistem pengawasan internal klien dilakukan dengan membuat rekomendasi *post-audit* pada peningkatan desain sistem yang ada.

Pada saat ini auditor eksternal menjadi faktor utama pengawasan organisasi dan berperan penting bagi Manajemen Risiko. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan dari *Big Four* mengenai kualitas monitoring internal yang terdapat pada klien *Big Four* jika dibandingkan dengan kualitas monitoring internal dari *non Big Four*. Penelitian terdahulu menemukan hubungan positif antara perusahaan audit, *Big Four* dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi (Cohen, *et al.*, 2004 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Penelitian ini menyebabkan *Big Four* audit mendirikan RMC di perusahaan untuk mengelola Manajemen Risiko. Perusahaan *non Big Four* audit cenderung belum mendirikan RMC sebagai sebuah komite yang berdiri sendiri.

Perusahaan audit *Big Four* mendirikan RMC untuk meningkatkan penilaian dan monitoring risiko.

2.1.9 Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan identik dengan jumlah segmentasi pasar yang dijangkau oleh perusahaan. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar keseluruhan atas suatu produk atau jasa yang semula bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen pasar, masing – masing segmen pasar cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Terdapat tiga pembagian segmen pasar menurut Ciptono (2001) yaitu :

1. Segmentasi pasar konsumen

Membentuk segmen pasar dengan menggunakan ciri-ciri konsumen (*consumer characteristic*), kemudian perusahaan akan menelaah apakah segmen-segmen konsumen ini menunjukkan kebutuhan atau tanggapan produk yang berbeda.

2. Segmentasi Pasar Bisnis

Membentuk segmen pasar dengan memperhatikan tanggapan konsumen (*consumer responses*) terhadap manfaat yang dicari, waktu penggunaan, dan merek.

3. Segmentasi pasar yang efektif

Mencakup beberapa penilaian yaitu : dapat diukur (*measurable*), besar segmen (*substantial*), dapat dijangkau (*accessible*), dapat dibedakan (*differentiable*) dan dapat diambil tindakan (*actionable*).

Perusahaan umumnya akan melakukan penentuan target pasar sebelum mengembangkan segmen bisnis yang mereka miliki. Penentuan target pasar dapat dianalisis berdasarkan konsentrasi apa yang diharapkan oleh perusahaan. Terdapat 5 jenis konsentrasi yang umumnya diterapkan oleh perusahaan :

1. Konsentrasi segmen tunggal

Perusahaan memilih berkonsentrasi pada segmen tertentu. Hal itu dilakukan karena dana yang terbatas, segmen tersebut tidak memiliki pesaing, dan merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya.

2. Spesialisasi selektif

Perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang dimiliki.

3. Spesialisasi pasar

Perusahaan memusatkan diri pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu.

4. Spesialisasi produk

Perusahaan memusatkan diri pada pembuatan produk tertentu yang akan dijual kepada berbagai segmen pasar.

5. Pelayanan penuh (*full market coverage*)

Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin dibutuhkan. Hanya perusahaan besar yang mampu menerapkan strategi ini, karena dibutuhkan sumber daya yang sangat besar.

Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang ada pada perusahaan. Carcello, *et al.*, (2005) menyatakan bahwa kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari peningkatan jumlah segmen bisnis perusahaan. Perusahaan dengan jumlah segmen bisnis yang banyak umumnya akan memiliki lebih banyak produk, strategi, dan bagian pemasaran (Subramaniam, *et al.*, 2009). Akibat dari hal tersebut, kompleksitas perusahaan yang besar akan meningkatkan risiko yang berbeda termasuk risiko operasional, sehingga perusahaan akan cenderung menuntut pembentukan komite dalam memantau risiko.

2.1.10 Risiko Pelaporan Keuangan

Tantangan dalam penyajian laporan keuangan yang dihadapi manajemen perusahaan sangatlah besar, hal itu sejalan dengan tingkat risiko yang akan dihadapi perusahaan. Risiko pelaporan keuangan dapat menjerumuskan Akuntan Publik dan Akuntan Manajemen ke dalam permasalahan hukum. Sebut saja kasus Kimia Farma, yang melakukan kecurangan atas laporan keuangan.

Kecurangan atas laporan keuangan itu cenderung berbanding lurus dengan proporsi asset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan, sehingga akan memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi karena tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009).

Salah satu kasus mengenai risiko pelaporan keuangan adalah kasus yang terjadi pada Satyam Computer Service tahun 2009, perusahaan outsourcing terbesar di India tersebut telah melakukan manipulasi atas jumlah piutang sebesar \$ 1 Miliar serta mengecilkan hutang perusahaan. Skandal tersebut dilakukan manajerial perusahaan untuk meningkatkan jumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan mampu meningkatkan nilai jual perusahaan di masyarakat.

2.1.11 Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya apabila rasio *leverage* rendah maka risiko keuangan atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah.

Struktur modal, merupakan penggabungan antara hutang dengan modal yang dikaitkan dengan struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Struktur kepemilikan mempengaruhi struktur modal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan maka semakin banyak hutang yang diperlukan dan dapat ditoleransi. Manajer perusahaan yang mempunyai kepemilikan dalam perusahaan, akan cenderung memilih pembiayaan

dengan hutang (*leverage*) untuk mengurangi dilusi kepemilikan pada saham mereka (*agency problem*) (Dita, 2011).

Perusahaan dengan proporsi kewajiban jangka panjang lebih besar akan memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi. Perusahaan dengan kewajiban yang lebih besar lebih mungkin memiliki perjanjian dan utang yang lebih tinggi risiko kelangsungan usahanya (Subramaniam, *et al.*, 2009). dari hal tersebut, perusahaan akan cenderung untuk membentuk RMC sebagai pengawasan risiko perusahaan.

2.1.12 Ukuran Perusahaan

Menurut Agnes Sawir (2004) ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan penjualan, total aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain, yang semuanya berkorelasi tinggi.

Ukuran perusahaan diharapkan mampu menjelaskan mengenai kompleksitas yang dialami oleh perusahaan tersebut. Kemungkinan yang terjadi adalah perusahaan dengan ukuran yang besar akan menghadapi risiko yang lebih besar daripada perusahaan dengan ukuran yang kecil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebagian besar menguji tentang pembentukan komite pada perusahaan secara sukarela dengan menggunakan berbagai macam variabel independen sebagai penghubungnya, namun sebagian besar

penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas tentang pembentukan Komite Audit secara sukarela, bukan pembentukan komite Manajemen Risiko (RMC). Hal tersebut terjadi karena isu tentang RMC baru muncul pada akhir – akhir ini sebagai salah satu elemen dari *good corporate governance*.

KPMG (2005) melakukan survey kepada 80 direktur dan senior eksekutif dari 200 perusahaan yang terdaftar di ASX (*Australian Stock Exchange*), hasil survey menunjukkan bahwa 54 persen responden telah mendirikan RMC. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa 70 persen melakukan pengungkapan RMC yang terintegrasi dengan Komite Audit.

Chau dan Leung (2006) melakukan penelitian berdasarkan data dari 397 perusahaan dagang publik di Hongkong menemukan bahwa ditemukannya hubungan positif antara proporsi *Independent Non Executive Director* terhadap dewan perusahaan dan keberadaan Komite Audit. Carson (2002) menemukan bahwa komite remunerasi berhubungan positif dengan auditor *Big Six*, hubungan antar perusahaan dan investasi kelembagaan.

Yatim (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara pembentukan RMC dan struktur dewan. Penelitian ini menggunakan sampel 690 perusahaan yang listing pada Bursa Malaysia pada tahun 2003. Variabel independen yang digunakan yaitu proporsi Komisaris Independen, CEO Independen, keahlian Dewan, dan kerajinan Dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi Komisaris Independen dan CEO Independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC

yang berdiri sendiri (terpisah dari Komite Audit). Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi juga berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

Andarini dan Januarti (2010) melakukan penelitian untuk menguji hubungan karakteristik Dewan Komisaris (proporsi Komisaris Independen dan ukuran Dewan Komisaris) dan karakteristik perusahaan (reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, dan ukuran perusahaan) terhadap pengungkapan RMC. Penelitian ini menggunakan sampel 248 perusahaan non-finansial yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan RMC dan SRMC.

Subramaniam, *et al.*, (2009) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan terdaftar dalam *Australia Stock Exchange* (ASX). Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik Dewan dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC di sebuah perusahaan. Penelitian ini juga untuk mengetahui tipe RMC, apakah RMC tergabung dengan Komite Audit atau terpisah dari Komite Audit dan berdiri sendiri (SRMC). Karakteristik dewan dalam penelitian ini terdiri dari proporsi Komisaris Independen, CEO Duality, *Duality*, dan ukuran Dewan. Sedangkan karakteristik perusahaan terdiri dari tipe auditor eksternal, tipe industri, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO Independen dan ukuran dewan yang besar. CEO Independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keberadaan RMC. CEO Independen dan ukuran Dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Variabel Dependen | Variabel Independen | Hasil Penelitian |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 1. | KPMG (2005) | | | 54% responden telah mendirikan RMC. Dari responden tersebut, 70% pengungkapan RMC terintegrasi dengan Komite Audit. |
| 2. | Chau dan Leung (2006) | <i>Independent non executive director</i> | Dewan Perusahaan dan Komite Audit | Ditemukan hubungan positif antara proporsi <i>Independent Non Executive Director</i> terhadap dewan perusahaan dan keberadaan Komite Audit |
| 3. | Carson (2002) | Pembentukan Komite Audit dan Komite Remunerasi secara sukarela | Auditor eksternal <i>big six</i> , hubungan antar perusahaan dan investasi kelembagaan | Pembentukan Komite remunerasi berhubungan positif dengan auditor <i>Big Six</i> , hubungan antar perusahaan dan investasi kelembagaan. |
| 4. | Yatim (2009) | Pembentukan RMC dan struktur dewan | Proporsi Komisaris Independen, CEO Independen, keahlian dewan dan kerajinan dewan | Proporsi Komisaris Independen dan CEO Independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari Komite Audit). Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi juga berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC. |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 5. | Andarini dan Januarti (2010) | Keberadaan RMC dan tipe RMC | Karakteristik Dewan Komisaris (proporsi Komisaris Independen dan ukuran dewan) dan karakteristik perusahaan (reputasi auditor, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan) | Hanya ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan RMC dan SRMC. |
| 6. | Subramaniam, (2009) | Keberadaan RMC dan tipe RMC | Karakteristik dewan, terdiri dari proporsi Komisaris Independen, CEO Duality, dan ukuran dewan. Karakteristik perusahaan terdiri dari tipe auditor eksternal, tipe industri, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, dan <i>leverage</i> . | RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Komite Manajemen Risiko merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh perusahaan sebagai bagian dari Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selama ini, masih banyak perusahaan yang mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada Komite Audit, itu karena peraturan yang ada hanya menetapkan bahwa perusahaan dalam pembentukan komite diluar Komite Audit, hanya didasari kerelaan dan kebutuhan perusahaan.

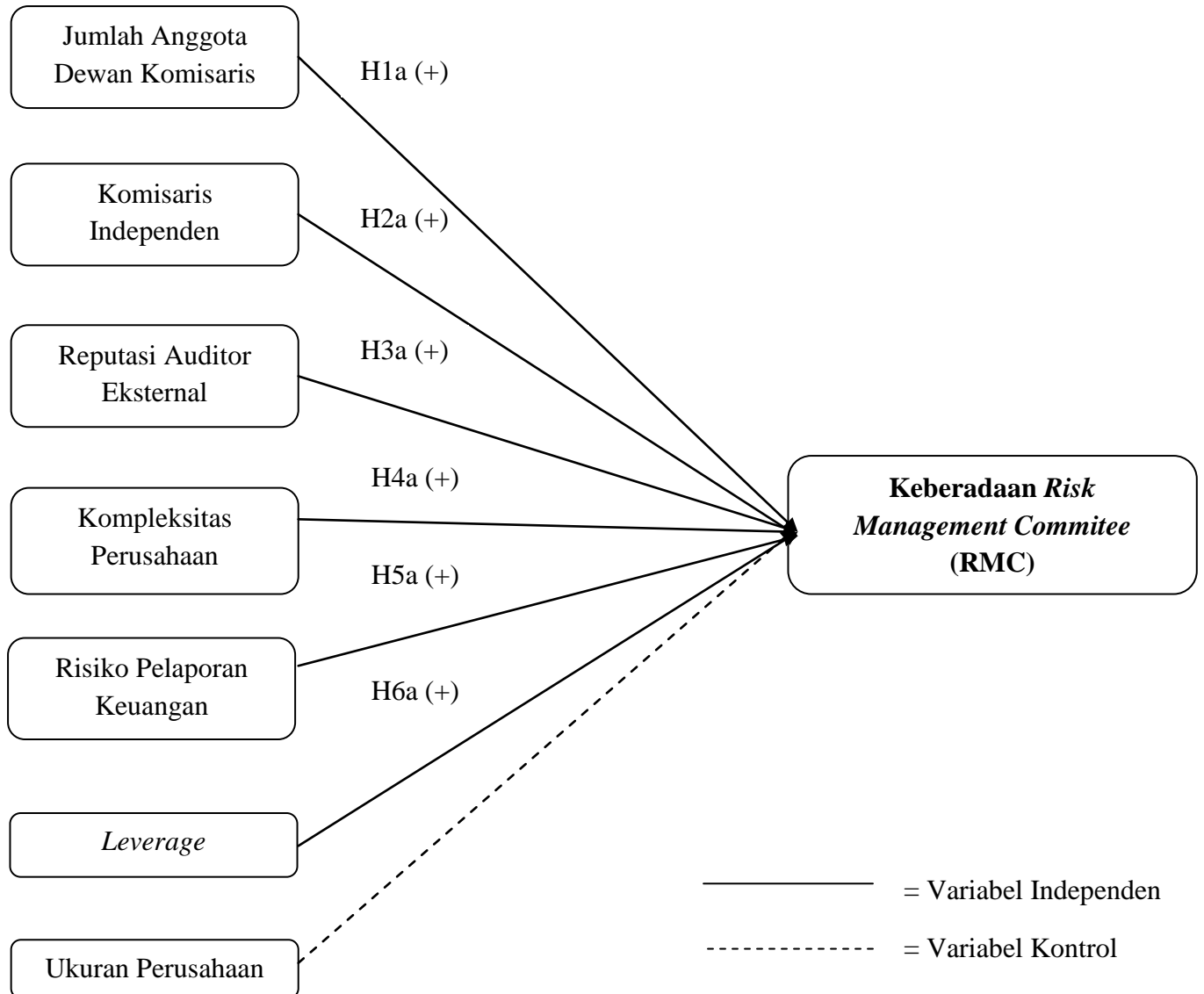
Beberapa perusahaan membentuk RMC yang terspesialisasi, yaitu dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit, agar tugas pengawasan

risiko perusahaan berjalan lebih efektif dan berkualitas. RMC merupakan mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan dalam tanggungjawabnya terhadap pengawasan risiko, Manajemen Risiko dan pengendalian internal. Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap keberadaan RMC dan tipe RMC, yaitu RMC yang tergabung dengan Komite Audit atau berdiri sendiri (SRMC).

Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan variable independen karakteristik Dewan Komisaris yaitu ukuran Dewan Komisaris dan proporsi Komisaris Independen serta karakteristik perusahaan yaitu reputasi auditor, kompleksitas perusahaan, risiko pelaporan keuangan, dan *leverage*. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

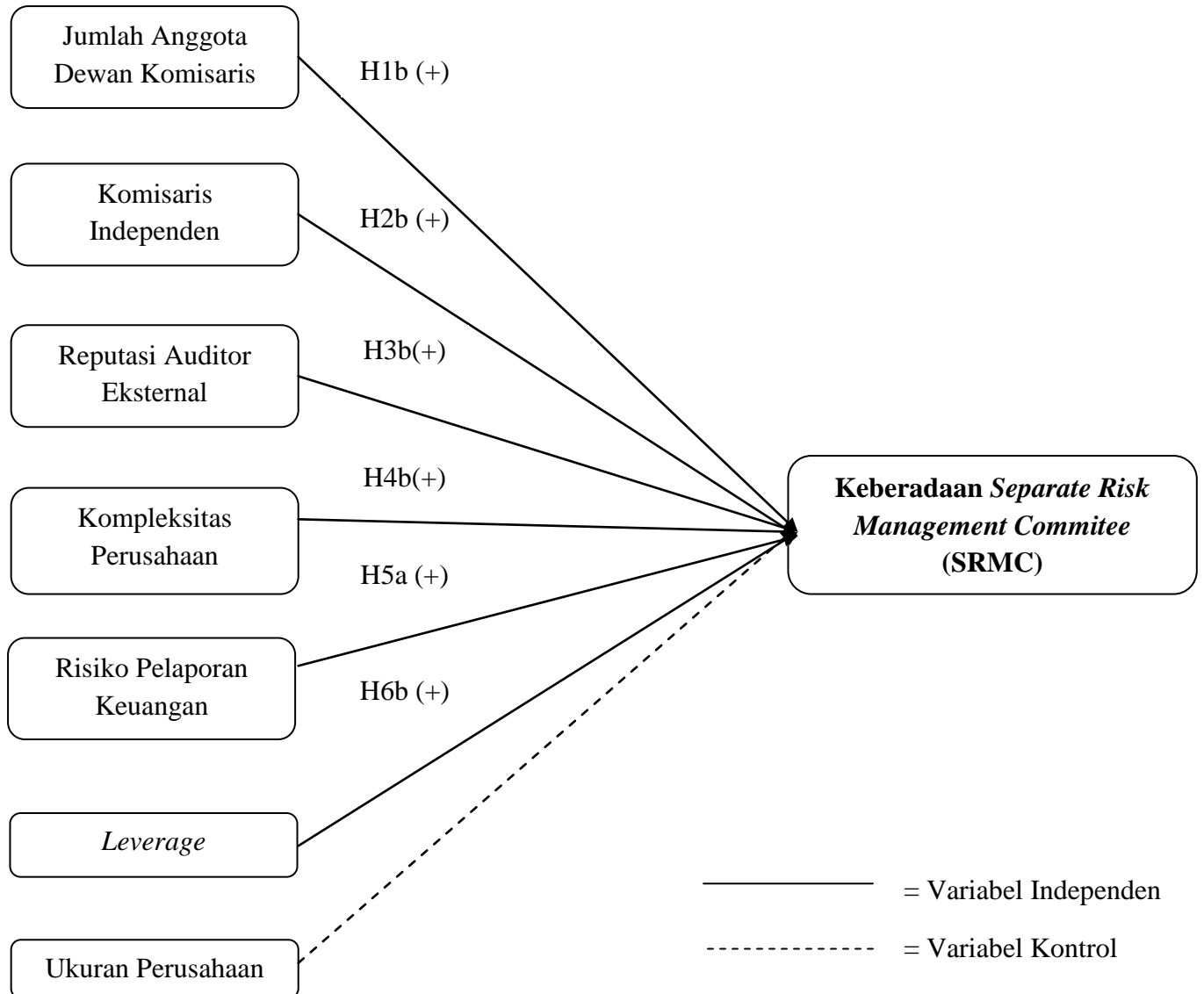
Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran I



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran II



2.4 Hipotesis

2.4.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang ditujukan untuk Manajemen Risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar diharapkan mampu mengurangi *agency problem* yang dihadapi oleh perusahaan, karena ketika jumlah Dewan Komisaris lebih besar, maka pengawasan atas perilaku *agent* akan lebih ditingkatkan.

Salah satu sistem pengawasan yang disediakan oleh Dewan Komisaris adalah keberadaan RMC. Ketika jumlah anggota Dewan Komisaris besar maka peluang dalam memilih anggota Dewan Komisaris dengan kemampuan dan kualitas yang baik dalam mengatur sub – komite dibawahnya termasuk Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H1a : Jumlah Anggota Dewan Komisaris berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC

H1b : Jumlah Anggota Dewan Komisaris berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

2.4.2 Proporsi Komisaris Independen

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), independensi merupakan hal utama yang harus diterapkan oleh perusahaan. Proporsi Komisaris Independen di dalam suatu Dewan Komisaris merupakan sebuah indikator independensi dari Dewan Komisaris tersebut. Kecenderungan yang terjadi adalah makin tinggi proporsi Komisaris Independen maka akan cenderung tinggi dalam menyediakan pengawasan kepada aktivitas perusahaan untuk meminimalkan risiko yang terjadi. Pincus, *et al.*, (1989) dalam Subramaniam, *et al.*, (2009) menyatakan bahwa keberadaan Komisaris Independen di dalam Dewan Komisaris akan meningkatkan kualitas pengawasan karena mereka tidak berhubungan dengan perusahaan sebagai pegawai, dan mereka juga berperan sebagai perwakilan independen dari kepentingan *shareholder*.

Perusahaan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan dan dengan membentuk RMC, sehingga diharapkan dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggung jawab pengawasan Manajemen Risiko dibandingkan dengan proporsi *non Executive Director* yang rendah. Selain itu, sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih menyukai pembentukan RMC yang berdiri sendiri atau terpisah dari Komite Audit karena pembentukan RMC ini akan bisa lebih berfokus pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko perusahaan. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah

mensyaratkan keberadaan Komisaris Independen pada seluruh perusahaan publik. Keputusan Menteri BUMN No 117/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Selain itu, pembentukan RMC pada perusahaan diharapkan mampu memberikan informasi berupa *good news* kepada para pengguna laporan keuangan, karena dengan adanya pembentukan RMC maka memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap penanggulangan risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H2a : Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC

H2b : Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

2.4.3 Reputasi Auditor Eksternal

Pada saat ini auditor menjadi faktor utama pengawasan organisasi dan berperan penting bagi Manajemen Risiko. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan dalam Subramaniam, *et al.*, (2009), menyatakan bahwa *Big Four* audit akan meningkatkan kualitas monitoring internal yang terdapat pada klien mereka, lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas monitoring internal dari *non Big Four* audit. Penelitian terdahulu menemukan hubungan positif antara perusahaan audit *Big Four* dan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi (Cohen, *et al.*, 2004 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009).

Perusahaan audit yang tergabung dalam *Big Four* dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan internal kliennya dibandingkan dengan auditor non *Big Four*. Tuntutan seperti itu dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga kualitas audit dan untuk melindungi reputasi mereka, sehingga dipandang oleh pengguna eksternal memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, tekanan yang lebih besar akan terdapat pada perusahaan yang menggunakan jasa audit *Big Four* untuk membentuk RMC dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa audit *non Big Four*. Selain itu, pembentukan RMC yang terpisah dari Komite Audit akan dipilih oleh auditor *Big Four* dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dari pengawasan dan penilaian risiko perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Yatim (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor *Big Four* cenderung untuk membentuk RMC. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H3a : Reputasi Auditor Eksternal berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC

H3b : Reputasi Auditor Eksternal berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

2.4.4 Kompleksitas Perusahaan

Kompleksitas perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki perusahaan, yang disajikan pada *Annual Report* perusahaan. Perusahaan dengan jumlah segmen bisnis yang lebih dari satu, umumnya memiliki lebih banyak produk, strategi, dan bagian pemasaran. Akibat dari hal tersebut, kompleksitas

perusahaan yang besar akan meningkatkan risiko yang berbeda, termasuk risiko operasional. Sehingga perusahaan akan cenderung menuntut pembentukan komite dalam memantau risiko serta menyajikan *good news* kepada pengguna eksternal, bahwa perusahaan memiliki komitmen atas risiko yang dihadapi. Penelitian Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari operasi perusahaan membutuhkan pengawasan yang lebih besar dari RMC yang secara utama berfokus untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan menemukan cara untuk mengurangi risiko tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H4a : Kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC

H4b : Kompleksitas perusahaan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam, *et a.l*, 2009). Pembentukan RMC dan terutama SRMC, akan memfasilitasi pengawasan yang lebih baik dari risiko-risiko tersebut.

Risiko pelaporan keuangan dapat diminimalkan dengan penerapan *Agency Theory* yang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada perusahaan. *Agency theory* memposisikan konflik antara *principal* dan *agent* dapat diredakan dengan pelaporan keuangan yang rutin dan cara *principal* melakukan pemantauan langsung atas kinerja

agent. Pelaporan keuangan yang baik akan merendahkan biaya modal perusahaan karena hanya ada sedikit ketidakpastian terhadap perusahaan yang melaporkan secara luas dan dapat dipercaya, sehingga risiko investasi menjadi lebih kecil (Dita, 2011). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H5a : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC

H5b : Risiko pelaporan keuangan berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

2.4.6 Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi cenderung memiliki perjanjian utang dan risiko yang lebih tinggi. Peminjam menuntut pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang efektif. Akibatnya terjadi permintaan yang lebih besar bagi perusahaan untuk mendirikan RMC sebagai komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan risiko dan kebijakan Manajemen Risiko yang akan diambil perusahaan. RMC yang terpisah dapat berfungsi lebih efektif dalam pengawasan risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

- H6a** : *Leverage* berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan RMC
- H6b** : *Leverage* berhubungan positif dengan kemungkinan keberadaan SRMC

BAB III

METODE PENELITIAN

BAB III menjelaskan mengenai variabel dan definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian mengenai determinan keberadaan *Risk Management Committee* pada perusahaan *go public* di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan pula tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran berikut. Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol.

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang membantu menjelaskan varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2009). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris (BOARDSIZE)

Dalam Subramaniam, *et al.*, (2009) disebutkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan memerlukan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar, hal itu digunakan untuk mengkoordinasi sub – komite yang ada dalam perusahaan tersebut yang secara keterkaitan berada di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan tersebut.

2. Proporsi Komisaris Independen (NONXECDIR)

Pada *two tier system* Dewan Komisaris sangat penting fungsinya dalam mekanisme pemantauan perilaku manajemen. Proporsi dari Komisaris Independen di dalam Dewan Komisaris merupakan kunci penting independensi sebuah dewan dalam perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya, dilakukan di Negara yang menerapkan *one tier system*, *Non Executive Director* dinyatakan dalam presentase jumlah *non Executive Director* dibandingkan dengan jumlah total *Executive Director* (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Dalam penelitian ini *Non Executive Director* diungkapkan sebagai Komisaris Independen, dan proporsi *Non Executive Director* diukur dengan Jumlah Komisaris Independen dibagi Jumlah total anggota Dewan Komisaris.

$$\text{NONEXECDIR} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah total anggota Dewan Komisaris}}$$

3. Reputasi Auditor Eksternal (BIGFOUR)

Reputasi auditor eksternal ditunjukkan dengan penggunaan jasa Akuntan Publik, dimana suatu perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternalnya yang tergabung dalam KAP *Big Four*, yang merupakan suatu kelompok KAP Internasional. Dalam penelitian ini, reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dimana diberi nilai satu (1) untuk perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tergabung dalam *Big Four* dan nilai nol (0) untuk perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tidak tergabung dengan *Big Four*.

4. Kompleksitas Perusahaan (BUSSEGMENT)

Kompleksitas yang lebih besar akan meningkatkan risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah segmen bisnis atau usaha yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Segmen bisnis atau usaha yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilihat pada *Annual Report* perusahaan.

5. Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP)

Perusahaan dengan perbandingan asset yang lebih besar dibandingkan dengan piutang usaha dan persediaan cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini risiko pelaporan ekuangan diukur dengan menjumlahkan piutang dan persediaan dibagi dengan total asset (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{FINREP} = \frac{\text{Piutang Usaha} + \text{Persediaan}}{\text{Total Asset}}$$

6. *Leverage* (LEV)

Kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi pada suatu waktu disebut dengan *leverage*. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan membagi total hutang dengan total asset (Subramaniam, *et al.*, 2009).

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas (Sekaran, 2009). Variabel dependen pada penelitian ini adalah :

1. Keberadaan *Risk Management Committee* (RMC)

Dalam penelitian ini, keberadaan RMC diklasifikasikan menjadi :

- a. Perusahaan tidak membentuk atau mengungkapkan keberadaan RMC
- b. Perusahaan membentuk dan mengungkapkan keberadaan RMC

Dalam penelitian ini, keberadaan RMC diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan RMC (baik tergabung dengan Komite Audit atau terpisah dengan Komite Audit) diberi nilai satu (1), sedangkan diberi nilai nol (0) apabila perusahaan tidak mengungkapkan keberadaan RMC dalam laporan tahunannya (Subramaniam, *et al.*, 2009)

2. Keberadaan RMC Yang Terpisah Dengan Komite Audit (SRMC)

Perusahaan yang mengungkapkan RMC diklasifikasikan kembali menjadi dua, yaitu :

- a. RMC tergabung, dimana pengungkapan RMC dalam *annual report* perusahaan tergabung dengan Komite Audit atau dibawah Komite Audit.
- b. RMC terpisah atau *Separate Risk Management Committee (SRMC)*, dimana pengungkapan RMC dalam *annual report* perusahaan terpisah dengan Komite Audit, sehingga berdiri sendiri sebuah komite yang bernama Komite Manajemen Risiko atau RMC.

3.1.3 Variabel Kontrol

a. Ukuran Perusahaan (SIZE)

Variabel Ukuran perusahaan menyatakan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Subramaniam, *et al.*, (2009), ukuran perusahaan diukur dengan menjumlahkan total asset perusahaan. Pernyataan tersebut didukung penelitian sebelumnya, menggunakan *total assets*, hal tersebut didasarkan pada penelitian Dyreng, *et al.*, (2007). Semakin besar total assets perusahaan, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Selain itu, asset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

$$\text{SIZE} = \log \text{ of Total Assets}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran 2003). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2011. Penggunaan tahun penelitian 2011 dilakukan karena penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat keberadaan *Risk Management Committe* pada perusahaan di Indonesia pada tahun 2011 serta melihat kembali ketaatan perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang

dikehendaki oleh peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah :

1. Perusahaan *non* keuangan dan perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan yang menerbitkan *Annual Report* pada periode tahun 2011
3. Datanya lengkap dan siap untuk diteliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) pada tahun 2011 dan Bursa Efek Indonesia. Data sekunder adalah data yang didapatkan dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan umumnya telah dalam bentuk publikasi berupa laporan, jurnal maupun artikel. Alasan penggunaan data sekunder yang didapatkan dari ICMD karena laporan keuangan bagi perusahaan *go public* berupa laporan keuangan audited telah disajikan melalui ICMD dan matching dengan laporan keuangan asli perusahaan karena *signalling theory* yang digunakan perusahaan, yaitu perusahaan akan memilih auditor berkualitas tinggi untuk menunjukkan kinerja maksimal yang mampu mereka berikan. Sehingga auditor akan mengaudit sesuai aturan yang berlaku. Pernyataan tersebut didukung dari surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pengurus PT Adira Dinamika Multi Finaance, yang menyatakan bertanggungjawab atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Pengurus, Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tata Kelola Perusahaan

dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit (www.idx.co.id/annoucement).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Secara umum terdapat dua metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang berasal dari pencatatan sumber atau publikasi lain (data sekunder). Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder berupa *annual report* perusahaan *non finansial* yang diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

b. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan menggunakan berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

Secara rinci, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terjadi dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Mengumpulan sumber data sekunder berupa *annual report* perusahaan yang listing pada Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2011, lalu melakukan tabulasi data untuk mendiversifikasikan komponen *annual report* yang digunakan sebagai variabel penelitian.

2. Melakukan studi pustaka sebagai acuan dalam pembahasan teori serta pembahasan hasil penelitian, metode studi pustaka juga dilakukan sebagai sarana menambah informasi yang digunakan dalam proses kerja penelitian ini.

3.5 Prosedur Analisis

Prosedur analisis merupakan salah satu bagian dari penelitian ini yang digunakan untuk mendapatkan data dari sampel penelitian yang ada sehingga bisa dilakukan pengujian statistik untuk data tersebut. Langkah – langkah prosedur analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mencari komponen dari variabel independen dan variabel dependen dalam *annual report* perusahaan sampel.
2. Melakukan tabulasi data berupa mengelompokkan informasi yang didapatkan dari *annual report* ke dalam bagian terpisah dari variabel independen dan dependen.
3. Melakukan Uji Regresi Logistik terhadap data yang telah ditabulasi.
4. Melakukan Analisis Statistik Deskriptif.
5. Melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil Uji Regresi Logistik dan Analisis Statistik Deskriptif.

3.6 Metode Analisis

Mengacu pada kerangka penelitian yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan adalah analisis *logistic regression*. Untuk menjamin keakuratan data, maka sebelum dilakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu analisis statistik deskriptif. Analisis regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya (Ghozali, 2011), sehingga pada penelitian ini tidak dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel – variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata – rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dan distribusi frekuensi (Ghozali,2011). Statistik deskriptif menyajikan ukuran – ukuran numerik yang sangat penting bagi sampel.

3.6.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Logistic Regression* (Regresi Logistik). Regresi Logistik tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedasitas, dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya (Ghozali, 2011). Regresi Logistik sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini karena variabel dependen dalam penelitian ini dichotomous (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Variabel dependen yang digunakan, yaitu keberadaan RMC di dalam perusahaan dan keberadaan RMC yang terpisah dengan komite audit. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran antara variabel kontinyu (*metric*) dan kategorial (*non – metric*) sehingga regresi Logistik dapat dipakai (Ghozali, 2011).

Persamaan Regresi Logistik dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Logit RMC} = \alpha + \beta_1\text{BOARDSIZE} + \beta_2\text{NONEXECDIR} + \beta_3\text{BIGFOUR} \\ + \beta_4\text{BUSSEGMENT} + \beta_5\text{FINREP} + \beta_6\text{LEV} + e$$

$$\text{Logit SRMC} = \alpha + \beta_1\text{BOARDSIZE} + \beta_2\text{NONEXECDIR} + \beta_3\text{BIGFOUR} \\ + \beta_4\text{BUSSEGMENT} + \beta_5\text{FINREP} + \beta_6\text{LEV} + e$$

Keterangan:

| | | |
|------------|---|--|
| RMC | = | Variabel dummy keberadaan RMC, dimana perusahaan yang memiliki RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya. |
| SRMC | = | Variabel dummy keberadaan RMC yang terpisah dari Komite Audit, dimana perusahaan yang memiliki RMC terpisah dari Komite Audit bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya. |
| α | = | Konstanta |
| NONEXECDIR | = | Proporsi Komisaris Independen terhadap total anggota Dewan Komisaris |
| BOARDSIZE | = | Jumlah Anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan |
| BIGFOUR | = | Variabel dummy dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal Big Four diberi nilai 1, dan 0 untuk sebaliknya. |

| | | |
|------------|---|---------------------------|
| BUSSEGMENT | = | Kompleksitas Perusahaan |
| FINREP | = | Risiko pelaporan keuangan |
| LEV | = | <i>Leverage</i> |
| BUSSEGMENT | = | Kompleksitas Perusahaan |

Analisis pengujian model regresi logistik:

a. Menilai Model Regresi

Regresi logistik adalah model regresi yang sudah mengalami modifikasi, sehingga karakteristiknya sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu, penentuan signifikansi secara statistik berbeda dalam dari regresi berganda. Kesesuaian model (*goodness of fit*) dapat dilihat dari R^2 ataupun F test. Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai probabilitas (sig.) pada uji *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011).

H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data.

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

b. Menilai *Overall Model Fit*

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) dihitung dengan *Log likelihood value* (nilai $-LL$) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai $-2LL$ pada awal (block number = 0), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai $-2LL$, pada saat Block Number = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai $-2LL$ Block Number = 0 > nilai $-2LL$ Block Number = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. *Log likelihood* pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan log likelihood menunjukkan model yang semakin baik.

c. Menguji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol antara satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam Regresi Logistik menguji R^2 menggunakan uji Cox & Snell dan Nagelkerke (Ghozali, 2011).

d. Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan *Wald statistic* dan nilai probabilitas (sig.) dengan cara nilai *Wald statistic* dibandingkan dengan *Chi-square* tabel, sedangkan nilai probabilitas (sig.) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α). Untuk menentukan penerimaan atau penolakan H_0 didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria :

- a. H_0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $> \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- b. H_0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $< \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.